

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE
NIP. 19661028 199203 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang	Nilai Salip	B Indeks
		IKM	B Indeks Kepuasan Masyarakat
		Presentase Realisasi Anggaran	90%
	Keg Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen
	Sub.Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
	Sub.Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
	Keg Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	1 Laporan
	Sub.Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang/bulan
	Sub.Keg Penyediaan administrasi/pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen
	Sub.Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen
	Sub.Keg Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan
	Sub.Keg Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen
	Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan
	Sub.Keg Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
	Keg Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Laporan
	sub.Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen
	sub.Keg Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
	sub.Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
	sub.Keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
	Keg Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SKM	1 Laporan
	Sub.Keg Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen
	Sub.Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang
	Sub.Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang
	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Penyediaan	1 Laporan
	Sub.Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Sub.Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Sub.Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
	Sub.Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Sub.Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan

Keg	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
Sub.Keg	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	1 Laporan
		-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	15 Unit
Sub.Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
Sub.Keg		-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan
Sub.Keg	Penyediaan Jasa surat menyurat	-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	-	13 Laporan
Sub.Keg	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan
Sub.Keg	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	4 Laporan
Keg	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	1 Dokumen
		-	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	1 Laporan
Sub.Keg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawarkan Pakainya	-	35 Unit
Sub.Keg	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	115 Unit
Sub.Keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit

Program

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Keg **Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Sub.Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
- Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub.Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keg **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Sub.Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub.Keg Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- Sub.Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
- Sub.Keg Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Sub.Keg Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Sub.Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
- Sub.Keg Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Keg **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**

- Sub.Keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub.Keg Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
- Sub.Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Sub.Keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Keg **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian**

- Sub.Keg Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Sub.Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
- Sub.Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Keg **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Sub.Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- Sub.Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub.Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub.Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
- Sub.Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Keg **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

- Sub.Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub.Keg **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**
- Sub.Keg Penyediaan Jasa surat menyurat
- Sub.Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub.Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keg **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

- Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
- Sub.Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub.Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Anggaran

Keterangan

=	Rp.	16.447.150.467	APBD
=	Rp.	715.668.000	
=	Rp.	561.738.000	
=	Rp.	12.825.000	
=	Rp.	7.350.000	
=	Rp.	5.725.100	
=	Rp.	3.750.200	
=	Rp.	124.279.700	
=	Rp.	13.405.087.893	
=	Rp.	11.504.639.643	
=	Rp.	1.239.000.000	
=	Rp.	321.030.000	
=	Rp.	72.053.800	
=	Rp.	53.257.550	
=	Rp.	92.009.100	
=	Rp.	67.037.800	
=	Rp.	56.060.000	
=	Rp.	253.126.030	
=	Rp.	93.110.000	
=	Rp.	65.177.080	
=	Rp.	31.624.950	
=	Rp.	63.214.000	
=	Rp.	182.186.000	
=	Rp.	28.650.000	
=	Rp.	146.936.000	
=	Rp.	6.600.000	
=	Rp.	528.097.855	
=	Rp.	12.911.296	
=	Rp.	181.421.759	
=	Rp.	60.369.800	
=	Rp.	50.400.000	
=	Rp.	222.995.000	
=	Rp.	297.798.369	
=	Rp.	297.798.369	
=	Rp.	711.602.020	
=	Rp.	300.000	
=	Rp.	521.940.400	
=	Rp.	189.361.620	
=	Rp.	353.584.300	
=	Rp.	211.984.300	
=	Rp.	126.600.000	
=	Rp.	15.000.000	

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA
SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

HI. MAHNILA JO TOLEMBALISE
Nip. 19661028 199203 2 010



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM
NEGRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	- Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	- Persentase rekomendasi SIUP B2/MB-Gol.B /MB Gol. C	- 100%
	Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana	- Jumlah Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan	- 1 Dokumen
2	- Terlaksananya Sarana Distribusi Perdagangan	- Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	- 100%
	Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar	- Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi	- 1 Laporan
	Sub.keg. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang	- 2 Orang
3	- Tercapai Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	- 100%
	Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan	- 4 Laporan
	Sub.keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting	- 4 Laporan
	Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada	- Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	- Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	- 4 Laporan
	Sub.keg. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga	- 6 Laporan
	Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	- Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	- 100 %
	Sub.keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi	- 1 Laporan
4	- Terlaksananya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	- Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi	- 20%
	Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	- 1 Laporan
	Sub.keg. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	- Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama	- 1 Laporan
	Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- 25 UMKM
	Sub.keg. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- 1 Laporan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 72.809.100	APBD
Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan	Rp. 72.809.100	
Sub.keg. Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	= Rp. 72.809.100	
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 170.080.450	APBD
Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi	= Rp. 170.080.450	
Sub.keg. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional	= Rp. 81.132.450	
Sub.keg. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang	= Rp. 88.948.000	

3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp. 3.009.921.500	APBD
	Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	= Rp. 150.468.350	
	Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang	= Rp. 91.075.450	
	Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting	= Rp. 59.392.900	
	Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok	= Rp. 2.753.345.350	
	Sub.keg Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	= Rp. 925.258.650	
	Sub.keg Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan	= Rp. 1.828.086.700	
	Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah	= Rp. 106.107.800	
	Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk	= Rp. 106.107.800	
4.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp. 280.974.900	APBD
	Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 182.295.650	
	Sub.keg Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di	= Rp. 182.295.650	
	Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 98.679.250	
	Sub.keg Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 98.679.250	

Palu, 13 Februari 2023



PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM
NEGERI

DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
Nip. 19770405 200212 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAJAR SETIAWAN, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR
NEGERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


FAJAR SETIAWAN, SE, MM
NIP. 19830304 200112 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	- Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	- Persentase penerbitan SKA	- 100%
	Keg Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai	- Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi	- 1 Laporan
	Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	- Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	- 1 Dokumen
2	- Terwujudnya Pengembangan Ekspor	- Nilai ekspor	- 9634,00 Juta USD
	Keg Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	- Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1	- 1 Laporan
	Sub.Keg Pameran Dagang Internasional/Nasional	- Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi	- 3 Pelaku Usaha
	Sub.Keg Pameran Dagang Lokal	- Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi	- 24 Pelaku Usaha
	Sub.Keg Peningkatan Citra Produk Ekspor	- Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang	- 2 Produk
	Sub.Keg Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	- Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	- 10 Pelaku Usaha

Program

	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 236.954.000	APBD
Keg Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi	= Rp. 236.954.000	
Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	= Rp. 236.954.000	
2. Program Pengembangan Ekspor	= Rp. 643.876.800	APBD
Keg Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui	= Rp. 643.876.800	
Sub.Keg Pameran Dagang Internasional/Nasional	= Rp. 117.510.900	
Sub.Keg Pameran Dagang Lokal	= Rp. 311.450.000	
Sub.Keg Peningkatan Citra Produk Ekspor	= Rp. 53.541.500	
Sub.Keg Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	= Rp. 161.374.400	

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


RICHARD ARNALDO, SE., MSA
Nip. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR
NEGERI


FAJAR SETIAWAN, SE., MM
Nip. 19830304 200112 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWANSYA, SH, MH**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitasi Dan Informasi Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG FASILITASI DAN
INFORMASI INDUSTRI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

IRWANSYA, SH, MH
NIP. 19650622 199603 1 003

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%
	Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 Dokumen
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Dokumen
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	1 Dokumen
	Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	1 Dokumen
2	Tercapainya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	64%
	Keg Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri	1 Dokumen
	Sub.keg Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri	1 Dokumen
	Sub.keg Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen
	Sub.keg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1.378.156.950	APBD
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 1.378.156.950	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	= Rp. 429.691.150	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	= Rp. 822.999.700	
Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 125.466.100	

2. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

- Keg** Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Sub.keg Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Sub.keg Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
- Sub.keg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

= Rp. 279.049.700 APBD

= Rp. 279.049.700

= Rp. 64866000

= Rp. 113982500

= Rp. 100201200



Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI DAN INFORMASI

IRWANSYA, SH, MH
Nip. 19650622 199603 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Industri

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	- 100%
	Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- 1 Dokumen
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan	- 3 Dokumen
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	- 2 Dokumen
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- 1 Dokumen
2	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri	- Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	- 100%
	Keg Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	- Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	- 1 Laporan
	Sub.keg Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	- 1 Dokumen
	Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	- 1 Dokumen

Program

Anggaran

Keterangan

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

= Rp. 990.192.050
= Rp.
= Rp. 53.646.000
= Rp.
= Rp. 239.941.150
= Rp. 696.604.900

APBD

2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri			
Keg	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	= Rp.	274.429.950	APBD
		= Rp.	274.429.950	
Sub.keg	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	= Rp.	125351950	
	Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Sub.keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	= Rp.	149078000	



Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Nip.19730831 200012 2 021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala UPTD PSMB

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PSMB
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM
NIP. 19780420 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
-1	-2	-3	-4
	- Meningkatkan Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang	- Nilai Sakip	- B Indeks
		- IKM	- B Indeks Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	- 90%
	Keg Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Keuangan	- 1 Dokumen
	Sub.Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- 1 Dokumen
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	- 1 laporan
	Sub.Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- 1 Paket
	Sub.Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- 1 Paket
	Sub.Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- 1 Paket
	Sub.Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Laporan
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- laporan
	Sub.Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- 1 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 1 Laporan
	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- laporan
	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	- 4 Unit
	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	- 4 Unit
	Sub.Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 7 Unit
	- Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	- Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	- 3%
	Keg. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 77 Indeks
		- Indeks Kinerja PSMB	- 3 Indeks
	Sub.Keg Verifikasi Mutu Produk	- Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	- 3 Komoditi
	Sub.Keg Pengembangan Layanan Pengujian	- Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	- 1 Dokumen
	Sub.Keg Pengembangan Layanan Sertifikasi	- Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	- 2 Sertifikat
	Sub.Keg Pengembangan Layanan Kalibrasi	- Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	- 150 Sertifikat

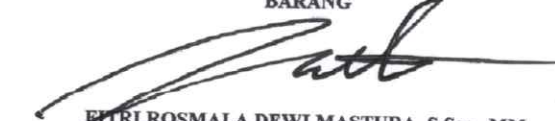
Program

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 827.499.286	APBD
Keg. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	= Rp. 329.760.000	
Sub.Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	= Rp. 329.760.000	
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	= Rp. 164.356.590	
Sub.Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	= Rp. 3.237.250	
Sub.Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	= Rp. 51.028.190	
Sub.Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	= Rp. 27.055.150	
Sub.Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	= Rp. 83.036.000	
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	= Rp. 231.450.696	
Sub.Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	= Rp. 12.348.000	
Sub.Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	= Rp. 168.737.496	
Sub.Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	= Rp. 50.365.200	
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	= Rp. 101.932.000	
Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	= Rp. 4.182.000	
Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	= Rp. 47.950.000	
Sub.Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	= Rp. 49.800.000	
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 619.064.233	APBD
Keg. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	= Rp. 619.064.233	
Sub.Keg Verifikasi Mutu Produk	= Rp. 140.645.300	
Sub.Keg Pengembangan Layanan Pengujian	= Rp. 174.769.222	
Sub.Keg Pengembangan Layanan Sertifikasi	= Rp. 123.142.400	
Sub.Keg Pengembangan Layanan Kalibrasi	= Rp. 180.507.311	

Palu, 13 Februari 2023



PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG


FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM
Nip. 19780420 201001 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAPIT TOLLA, SE
Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
PLT. KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN
DAERAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
-1-	-2-	-3-	-4-
	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang	- Nilai Sakip	B Indeks
		- IKM	B Indeks Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	90%
Keg	Tertaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	1 Dokumen
sub.keg	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Keg	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan
sub.keg	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
sub.keg	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
sub.keg	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
sub.keg	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan
sub.keg	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawatan	1 Dokumen
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan
sub.keg	Ponyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
sub.keg	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Keg	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawalan	1 Dokumen
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan
sub.keg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihayarkan Paikuva	8 Unit
sub.keg	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit
	- Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Persentase Layanan IKM	100%
Keg	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	959 IKM
sub.keg	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	2 Dokumen

Program

		Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 997.672.570	APBD
Keg	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	= Rp. 635.160.000	
sub.keg	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	= Rp. 635.160.000	
Keg	Administrasi Umum Perangkat Daerah	= Rp. 89.776.600	
sub.keg	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	= Rp. 4.140.000	
sub.keg	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	= Rp. 47.010.100	
sub.keg	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	= Rp. 12.286.500	
sub.keg	Fasilitasi kunjungan tamu	= Rp. 11.640.000	
sub.keg	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	= Rp. 14.700.000	
Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 168.835.970	
sub.keg	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	= Rp. 164.635.970	
sub.keg	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	= Rp. 4.200.000	
Keg	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 103.900.000	
sub.keg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	= Rp. 75.000.000	
sub.keg	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	= Rp. 28.900.000	
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1.003.341.698	APBD
Keg	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 1.003.341.698	
sub.keg	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	= Rp. 1.003.341.698	

Palu, 13 Februari 2023



PIHAK PERTAMA
PLT. KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH

HAVIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PELAKSANAAN TEKNIS
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
-1	-2	-3	-4
	- Meningkatkan Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang	- Nilai Sakip	- B Indeks
		- IKM	- B Indeks Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	- 90%
	Keg Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Keuangan	- 1 Dokumen
	Sub.Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	- 1 Dokumen
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	- 1 laporan
	Sub.Keg Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	- 1 Paket
	Sub.Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- 1 Paket
	Sub.Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Laporan
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- 1 laporan
	Sub.Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 1 Laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum	-
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- laporan
	Sub.Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihavirkan Pakainya	- 1 Unit
	Sub.Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	- 5 Unit
	- Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	- 90%
	Keg. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen	- 1 Laporan
	Sub.Keg Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	- 4 BPSK
	Sub.Keg Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	- Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	- 1 LPKSM
	Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	- Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	- 16 Pengaduan
	Keg. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	- 1 Laporan
	Sub.Keg Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	- 2 Laporan
	Sub.Keg Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Kasus yang Ditangani	- 4 Kasus

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 404.633.815	APBD
Keg.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	= Rp. 251.160.000	
Sub.Keg	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	= Rp. 251.160.000	
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	= Rp. 49.888.040	
Sub.Keg	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	= Rp. 32.434.240	
Sub.Keg	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	= Rp. 1.583.800	
Sub.Keg	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	= Rp. 15.870.000	
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 68.468.875	
Sub.Keg	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	= Rp. 66.968.875	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	= Rp. 1.500.000	
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 35.116.900	
Sub.Keg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	= Rp. 2.356.900	
Sub.Keg	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	= Rp. 32.760.000	
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 1.454.830.150	APRD
Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	= Rp. 1.127.415.000	
Sub.Keg	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	= Rp. 905.036.100	
Sub.Keg	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	= Rp. 120.415.000	
Sub.Keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	= Rp. 101.963.900	
Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	= Rp. 327.415.150	
Sub.Keg	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	= Rp. 163.707.350	
Sub.Keg	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	= Rp. 163.707.800	

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



RICHARD ARNALDO, SE., MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PELAKSANAAN TEKNIS
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN



DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006